

## ABSTRAK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat ialah hak memperoleh informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Lalu juga bertujuan untuk mengetahui upaya strategis untuk mengimplementasikan penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penulisan hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*literature research*) untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik analisis data dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam rangka penyelenggaraan sektor pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Walaupun begitu, pemerintah juga sedang mengupayakan penerapan pengaturan keterbukaan informasi publik pada PBJP dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI No. 1/2021). Kemudian hasil kedua menunjukkan bahwa upaya strategis yang dilakukan yakni dengan adanya PerKI No. 1/2021 yang digunakan sebagai peraturan penunjang untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, yang mana sektor PBJP juga diatur lebih lanjut dalam aturan tersebut yang meminta agar seluruh informasi PBJP dibuka untuk publik. Namun, apabila seluruh informasi mengenai PBJP dibuka, dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilakukan Uji Konsekuensi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan.

**Kata Kunci: Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pengadaan Barang dan Jasa.**

## **ABSTRACT**

*The right to access information is a fundamental human right, and public information disclosure is one of the important characteristics of a democratic state that highly values the sovereignty of the people to achieve good governance. One of the rights held by the public is the right to access information about government procurement of goods and services. This study aims to determine the urgency of implementing regulations on public information disclosure in the procurement sector. It also aims to identify strategic efforts to implement the regulations on public information disclosure, especially PerKI No. 1 of 2021 in the procurement of goods and services sector.*

*This research is a legal study with a qualitative research type that uses doctrinal legal writing methods with conceptual approach and statutory approach. The research specification employed in this legal writing is descriptive, using literature research to collect secondary data. The data analysis technique in this legal writing uses qualitative analysis technique.*

*The results of this study indicate that currently the implementation of public information disclosure regulations has not been fully carried out properly in the administration of the goods and services procurement sector. However, the government is also striving to implement public information disclosure regulations in PBJP (Goods and Services Procurement) by issuing Information Commission Regulation Number 1 of 2021 on Public Information Service Standards (PerKI No. 1/2021). The second result shows that strategic efforts have been made, namely the issuance of PerKI No. 1/2021 which serves as a supporting regulation to optimize public information services, wherein the PBJP sector is further regulated in this rule, requiring that all PBJP information be disclosed to the public. However, disclosing all information regarding PBJP can lead to several problems. To address this, a Consequence Test can be conducted as an effort to resolve these issues.*

**Keywords: Policy, Information Disclosure, Procurement of Goods and Services.**